



## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN BARITO SELATAN**

**Jl. Pelita Raya No.288 Buntok Kode Pos 73711 Kalimantan Tengah**

**Telp (0525) 21196 Faxsimile (0525) 21196**

**Website : [www.dpmpptsp.baritoselatankab.go.id](http://www.dpmpptsp.baritoselatankab.go.id)**

**Email : [dpmpptspbarisel@gmail.com](mailto:dpmpptspbarisel@gmail.com)**

# **LAPORAN**

## **PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

**SEMESTER I (JANUARI – JUNI)**

**SEMESTER II (JULI– DESEMBER)**

# **TAHUN 2023**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>3</b>
A. LATAR BELAKANG .....	3
B. LANDASAN HUKUM.....	4
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
D. KERANGKA ALUR.....	5
<b>BAB II GAMBARAN UMUM DAN PELAYANAN</b> .....	<b>7</b>
A. VISI.....	7
B. MISI.....	7
C. SASARAN .....	7
D. MANAJEMEN PELAYANAN .....	7
E. MOTTO PELAYANAN .....	7
F. STANDAR PELAYANAN.....	7
G. PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK.....	8
H. JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DITERBITKAN .....	9
I. SUMBER DAYA MANUSIA.....	14
J. SARANA DAN PRASARANA .....	14
K. LAYANAN PENGADUAN .....	15
L. INOVASI.....	18
M. SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT .....	18
<b>BAB III RENCANA INVESTASI</b> .....	<b>21</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>23</b>
A. KESIMPULAN .....	23
B. SARAN .....	23

## Lampiran - lampiran

1. Rekapitulasi Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Rekapitulasi Surat Izin Pemasangan Reklame
3. Rekapitulasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
4. Rekapitulasi PKKPR
5. Rekapitulasi Surat Izin Praktik Promosi Kesehatan
6. Rekapitulasi Surat Izin Praktik Radiografer
7. Rekapitulasi Surat Izin Praktik Elektromedis
8. Rekapitulasi Surat Izin Praktik Rekam Medik
9. Rekapitulasi Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
10. Rekapitulasi Surat Izin Praktik Fisioterapi
11. Rekapitulasi Surat Izin Puskesmas
12. Rekapitulasi Surat Izin Praktik Bidan
13. Rekapitulasi Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
14. Rekapitulasi Surat Izin Praktik Perawat
15. Rekapitulasi Surat Izin Praktik Dokter
16. Rekapitulasi Surat Izin Praktik Apoteker
17. Rekapitulasi Surat Izin Operasional Rumah Sakit
18. Rekapitulasi Surat Izin Klinik
19. Rekapitulasi Surat Izin Apotik
20. Rekapitulasi Surat Tanda Kecakapan (STK)
21. Rekapitulasi Surat Izin Bangunan Air di Perairan Pedalaman
22. Rekapitulasi Surat Izin Operasional Khusus
23. Rekapitulasi Surat Izin Tambat Labuh Kapal
24. Rekapitulasi Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS)
25. Rekapitulasi SPP-IRT
26. Rekapitulasi Surat Izin Usaha Perikanan

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah, Bupati/Walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Gubernur secara periodik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima dan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.

Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Barito Selatan juga tetap melakukan penyusunan laporan semester penyelenggaraan pelayanan perizinan setiap tahunnya. Saat ini DPMPTSP Kabupaten Barito Selatan menggunakan system aplikasi OSS RBA dan SICANTIK CLOUD serta SIMBG dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. Untuk penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait. Dinas Penanaman Modal dan PTSP bertanggung jawab secara administratif sampai dengan pengawasan dan evaluasi setelah perizinan diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menunjang pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan telah membuat Hak Ases Turunan dari sistem OSS-RBA yang diberikan kepada beberapa Organisasi Perangkat Daerah, antara lain ;

- a. Dinas Lingkungan Hidup
- b. Dinas Pemuda, Olahraga dan Parawisata
- c. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- d. Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan
- e. Dinas Kesehatan
- f. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UMKM
- g. Dinas Perhubungan
- h. ATR/Badan Pertanahan Nasional

Dalam rangka percepatan pelaksanaan perizinan berusaha, pemerintah sudah menerapkan system Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang lebih dikenal dengan nama **Online Single Submission (OSS)** yang saat ini sudah dalam bentuk OSS Risk Based Approach (OSS RBA). Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana yang tercakup dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Barito Selatan memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang merupakan tugas pokok dan fungsi 4 (empat) bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, antara lain :

1. Bidang Perencanaan, Pengembangan iklim dan promosi Penanaman Modal, terdiri dari ;
  - a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal
  - b. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal
  - c. Seksi Promosi Penanaman Modal
2. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri dari :
  - a. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan
  - b. Seksi Pengaduan dan Informasi layanan
  - c. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan
3. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari :
  - a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I
  - b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II
  - c. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III
4. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari :
  - a. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
  - b. Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
  - c. Seksi Pelaksanaan Penanaman Modal

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan menjadi sesuatu hal yang teramat penting dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan diantaranya kecepatan dalam penggunaan *Online Single Submission (OSS) RBA* Kemampuan (Penguasa Teknologi) / Aplikasi layanan *OSS* dan Kecepatan Waktu dalam pelayanan perizinan. Untuk itu perlu adanya Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan di setiap semester guna memberi informasi dan sebagai bahan evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan untuk kedepannya agar menjadi lebih baik lagi.

## **B. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud  
Untuk memberikan informasi tentang perkembangan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan.
2. Tujuan  
Sebagai bahan evaluasi terhadap berbagai permasalahan dan perkembangan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan sehingga dapat diupayakan solusi (jalan keluar) untuk mengatasi permasalahan tersebut.

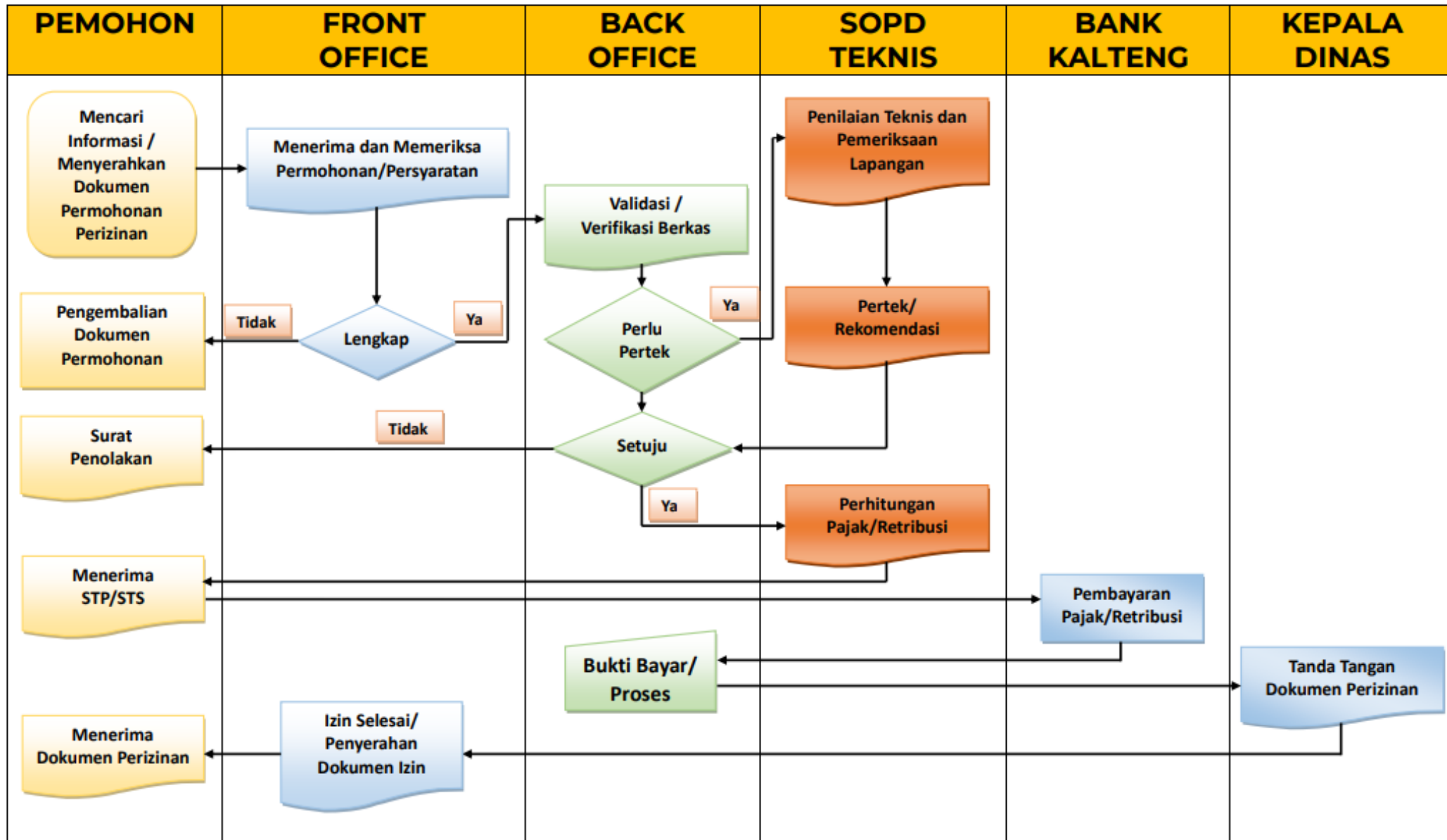
### **D. KERANGKA ALUR**

Alur Proses Penerbitan Perizinan dan NonPerizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan, dengan mekanisme sebagai berikut :

#### **KETERANGAN :**

1. Pemohon mencari Informasi/Menyerahkan Dokumen Permohonan Perizinan pada Front Office, kemudian Front Office Menerima dan Memeriksa Permohonan/Persyaratan Pemohon. Apabila berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi tetapi apabila berkas lengkap maka berkas tersebut akan di validasi oleh Back Office.
2. Back Office akan memvalidasi berkas tersebut apakah memerlukan penilaian dari OPD Teknis, Apabila diperlukan maka akan dilakukan penilaian dokumen oleh OPD Teknis agar dapat diterbitkan Rekomendasi/Pertimbangan Teknis. Apabila hasil penilaian tidak sesuai dengan ketentuan pada OPD Teknis maka permohonan tersebut ditolak. Apabila hasil penilaian sesuai maka diberikan Rekomendasi/Pertimbangan Teknis dari OPD Teknis.
3. Apabila terdapat kewajiban Pajak/Retribusi yang wajib dibayar oleh Pemohon maka OPD Teknis akan menghitung besaran Pajak/Retribusi tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku. OPD teknis akan membuat STP/STS kepada Pemohon sebagai dasar pembayaran kepada pihak Bank.
4. Setelah pemohon melakukan pembayaran di Bank, bukti bayar tersebut diserahkan kembali kepada Back Office agar dokumen izin dapat di cetak. Setelah izin dicetak dilakukan proses Tanda Tangan oleh Kepala Dinas. setelah izin selesai di tanda tangan dokumen diserahkan kepada Front Office agar dapat diserahkan kepada Pemohon.

Tabel 1. DIAGRAM ALIR/FLOW CHART PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DAN PELAYANAN**

#### **A. VISI**

Terwujudnya Organisasi Perangkat Daerah berkontribusi terdepan dalam meningkatkan Investasi dan Pelayanan Prima kepada Masyarakat.

#### **B. MISI**

1. Menetapkan kebijakan penanaman modal di daerah agar menjadi Investasi Riil.
2. Menjalin kerjasama penanaman Modal dalam rangka peningkatan peluang usaha.
3. Mempromosikan potensi-potensi unggulan di daerah agar menjadi peluang investasi.
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Penanaman Modal dan Perizinan.
5. Mengolah dan memperbaiki Database dan System Informasi Penanaman Modal
6. Meningkatkan dan melaksanakan Pengawasan Penanaman Modal.

#### **C. SASARAN**

Terwujudnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegrasi dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan.

#### **D. MANAJEMEN PELAYANAN**

Dalam menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan menerapkan Manajemen Pelayanan yang meliputi :

1. Perencanaan pelayanan;
2. Pelaksanaan pelayanan;
3. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
4. Pengawasan internal;
5. Pengelolaan informasi, penyuluhan dan pelayanan konsultasi;
6. Monitoring dan evaluasi dan;
7. Pelaporan pelayanan

#### **E. MOTTO PELAYANAN**

Motto Pelayanan adalah **"IZIN CEPAT DAN MUDAH"** yang diharapkan penerima layanan dan pemberi layanan akan merasakan layanan yang menyenangkan.

#### **F. STANDAR PELAYANAN**

Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Komponen standar Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan diantaranya:

1. Standar Pelayanan (*Service*) :
  - a. Persyaratan
  - b. Sistem Mekanisme, Prosedur
  - c. Jangka Waktu Pelayanan
  - d. Biaya Tarif
  - e. Produk Pelayanan
  - f. Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan



2. Standar Pelayanan (*Manufacturing*) :
  - a. Dasar Hukum
  - b. Sarpras dan atau fasilitas
  - c. Kompetensi Pelaksana
  - d. Pengawasan Internal
  - e. Jaminan Pelayanan
  - f. Jumlah Pelaksana
  - g. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
  - h. Evaluasi Kinerja Pelaksana

## G. PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan. Dinas Penanaman Modal dan PTSP melaksanakan pelayanan Perizinan dan NonPerizinan dengan menggunakan metode Pelayanan Secara Elektronik (PSE). Saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan melaksanakan Pelayanan Secara Elektronik (PSE) dengan 3 (tiga) aplikasi yaitu Online Single Submission (OSS), SICANTIK dan SIMBG yang dapat di akses melalui *website* : [oss.go.id](http://oss.go.id) dan [sicantik.layanan.go.id](http://sicantik.layanan.go.id). dan [simbg.pu.go.id](http://simbg.pu.go.id)

PSE bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan dan NonPerizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan PSE dapat melalui berbagai macam Aplikasi yang sudah terintegrasi dengan lembaga terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**Tabel 1.** Daftar Perizinan dan Non Perizinan menggunakan Sistem Aplikasi SICANTIK

No	Perizinan dan NonPerizinan	Jenis	Diterbitkan Melalui
1	2	3	4
1	Izin Reklame	Izin Usaha	SICANTIK

**Tabel 2.** Daftar Perizinan dan Non Perizinan menggunakan Sistem Aplikasi SIMBG

No	Perizinan dan NonPerizinan	Jenis	Diterbitkan Melalui
1	2	3	4
1	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Non Izin	SIMBG
2	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Non Izin	SIMBG
3	Surat Keterangan Kepemilikan Banguna Gedung (SKKB)	Non Izin	SIMBG

**Tabel 3.** Daftar Perizinan dan Non Perizinan menggunakan Sistem Aplikasi Online Single Submission (OSS)-RBA

No	Perizinan dan NonPerizinan	Jenis	Diterbitkan Melalui
1	2	3	4
1	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Non Izin	OSS
2	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Non Izin	OSS

3	Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS)	Non Izin	OSS
4	Surat Izin Apotik	Izin	OSS
5	Surat Izin Klinik	Izin	OSS
6	Surat Izin Operasional Rumah Sakit	Izin	OSS
7	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	Non Izin	OSS

**Tabel 4.** Daftar Perizinan dan Non Perizinan menggunakan Sistem OFFLINE

No	Perizinan dan NonPerizinan	Jenis	Diterbitkan Melalui
1	2	3	4
1	Izin Operasional Khusus	Izin	OFFLINE
2	Izin Tambat Labuh Kapal	Izin	OFFLINE
3	Izin Bangunan Air di Perairan Pedalamana	Izin	OFFLINE
4	Izin Trayek	Izin	OFFLINE
5	Surat Tanda Kecakapan (STK)	Non Izin	OFFLINE
6	Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Lahan untuk Perumahan dan Permukiman	Non Izin	OFFLINE
7	SIKGGZ	Izin	OFFLINE
8	SIPA	Izin	OFFLINE
9	SIPB	Izin	OFFLINE
10	SIP ELEKTROMEDIS	Izin	OFFLINE
11	SIP FISIOTERAPI	Izin	OFFLINE
12	SIP ATLM	Izin	OFFLINE
13	SIPP	Izin	OFFLINE
14	SIO PUSKESMAS	Izin	OFFLINE
15	SIP RADIOGRAFER	Izin	OFFLINE
16	SIP RADIOLOGI	Izin	OFFLINE
17	SIP REKAM MEDIK	Izin	OFFLINE
18	SIK PROMKES	Izin	OFFLINE
19	SIP DOKTER	Izin	OFFLINE
20	SIPTTK	Izin	OFFLINE

#### H. JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DITERBITKAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan. Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan meliputi seluruh Perizinan dan NonPerizinan di Bidang :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penata Ruang;
4. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat;
5. Sosial;
6. Tenaga Kerja;

7. Lingkungan Hidup;
8. Perhubungan;
9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
10. Kebudayaan;
11. Kelautan dan Perikanan;
12. Pariwisata;
13. Pertanian;
14. Perdagangan;
15. Perindustrian;
16. Pemukiman;

**Tabel 1.** Rekapitulasi Keseluruhan Data Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan per Januari 2023 s/d Desember 2023

<b>NO</b>	<b>JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN</b>	<b>APLIKASI</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	SURAT IZIN PEMASANGAN REKLAME	SICANTIK	329
2	NOMOR INDUK BERUSAHA	OSS	1583
3	PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)	SIMBG	48
4	IZIN OPERASIONAL KHUSUS	OFFLINE	3
5	IZIN TAMBAT LABUH KAPAL	OFFLINE	51
6	IZIN BANGUNAN AIR DI PERAIRAN PEDALAMAN	OFFLINE	6
7	IZIN TRAYEK	OFFLINE	0
8	SURAT TANDA KECAKAPAN (STK)	OFFLINE	2
9	IZIN USAHA PERIKANAN (IUP)	MANUAL	11
10	SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)	OSS	194
11	SERTIFIKAT LAIK HIGIENIS SANITASI (SLHS)	OSS	4
12	PERSETUJUAN PRINSIP PEMANFAATAN LAHAN UNTUK PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	MANUAL	0
13	SIKGZ	MANUAL	0
14	SIPA	MANUAL	17
15	SIPB	MANUAL	38
16	SIP ELEKTROMEDIS	MANUAL	1
17	SIP FISIOTERAPI	MANUAL	3
18	SIP ATLM	MANUAL	4
19	SIPP	MANUAL	54
20	SIO PUSKESMAS	MANUAL	2
21	SIP RADIOGRAFER	MANUAL	1
22	SIP REKAM MEDIK	MANUAL	1
23	SIK PROMKES	MANUAL	1
24	SIP DOKTER	MANUAL	54
25	SIPTTK	MANUAL	9
26	SURAT IZIN APOTIK	OSS	7
27	SURAT IZIN KLINIK	OSS	3
28	IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT	OSS	1
29	PKKPR	OSS	4
	<b>TOTAL</b>		<b>2396</b>

**Tabel 2.** Rekapitulasi Data Perizinan dan Non Perizinan Per-Sektor pada Semester I (Januari - Juni) Tahun 2023

NO	BIDANG PERIZINAN	BULAN						JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN</b>							
<b>1.</b>	<b>SEKSI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN I</b>							
A	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	0	0	0	0
B	SEKTOR PERTANIAN	0	0	0	0	0	0	0
C	SEKTOR PERIKANAN :							
	1. IZIN USAHA PERIKANAN (IUP)	0	0	0	0	0	11	11
D	SEKTOR PERKEBUNAN	0	0	0	0	0	0	0
E	SEKTOR ESDM	0	0	0	0	0	0	0
F	SEKTOR KEHUTANAN	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>SEKSI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN II</b>							
A	SEKTOR PENDIDIKAN	0	0	0	0	0	0	0
B	SEKTOR KESEHATAN :							
	1. SIPA	0	0	1	2	4	0	7
	2. SIP DOKTER	2	0	1	3	4	13	23
	3. SIP PERAWAT	2	2	6	4	8	3	25
	4. SIPPTK	2	0	0	1	1	0	4
	5. SIP BIDAN	0	1	7	4	4	2	18
	6. SIO PUSKESMAS	0	1	1	0	0	0	2
	7. SIP FISIOTERAPI	1	0	0	0	1	0	2
	8. SIP ATLM	0	0	0	0	2	0	2
	9. SIP REKAM MEDIK	0	0	1	0	0	0	1
	10. SIP ELEKTROMEDIS	0	0	0	0	1	0	1
	11. SIP RADIOGRAFER	0	0	0	0	0	1	1
	12. SIP PROMKES	0	0	0	0	0	0	1
	13. SIKGZ	0	0	0	0	0	0	0
	14. SURAT IZIN APOTIK	2	0	0	1	2	0	4
	15. SURAT IZIN KLINIK	0	0	0	0	1	0	1
	16. IO RUMAH SAKIT	0	0	1	0	0	0	1
	17. SLHS	0	0	1	2	0	0	3
	18. SPP-IRT	10	12	18	7	3	5	55
C	SEKTOR PERHUBUNGAN :							
	1. IZIN TAMBAT LABUH KAPAL	0	5	6	3	2	10	26
	2. IZIN BANGUNAN AIR DI PERAIRAN PEDALAMAN	0	0	1	0	1	2	4
	3. SURAT TANDA KECAKAPAN (STK)	1	1	0	0	0	0	2
	4. IZIN TRAYEK	0	0	0	0	0	0	0

D	SEKTOR SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0	0	0	0	0	0
E	SEKTOR PENELITIAN	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>SEKSI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN III</b>							
A	SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG :							
	1. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)	2	0	3	6	3	4	18
	2. PKKPR	0	0	1	0	0	0	1
	3. SURAT IZIN PEMASANGAN REKLAME	49	39	38	15	23	24	188
B	SEKTOR PERMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	0	0	0	0	0	0
C	SEKTOR PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM :							
	1. NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	67	139	349	103	402	71	1131
D	SEKTOR PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARAWISATA	0	0	0	0	0	0	0
E	SEKTOR TENAGA KERJA DAN TRANMIGRASI	0	0	0	0	0	0	0
0	SEKTOR PERTANIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	0	0	0	0	0	0
0	SEKTOR PENANAMAN MODAL	0	0	0	0	0	0	0

**Tabel 3.** Rekapitulasi Data Perizinan dan Non Perizinan Per-Sektor pada Semester I (Juli - Desember) Tahun 2023

NO	BIDANG PERIZINAN	BULAN						JUMLAH
		JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN</b>							
<b>1.</b>	<b>SEKSI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN I</b>							
A	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	0	0	0	0
B	SEKTOR PERTANIAN	0	0	0	0	0	0	0
C	SEKTOR PERIKANAN :							
	1. IZIN USAHA PERIKANAN (IUP)	0	0	0	0	0	0	0
D	SEKTOR PERKEBUNAN	0	0	0	0	0	0	0
E	SEKTOR ESDM	0	0	0	0	0	0	0
F	SEKTOR KEHUTANAN	0	0	0	0	0	0	0

<b>2. SEKSI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN II</b>								
A	SEKTOR PENDIDIKAN	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
B	SEKTOR KESEHATAN :							
	1. SIPA	4	1	1	0	3	1	<b>10</b>
	2. SIP DOKTER	12	5	6	2	4	2	<b>31</b>
	3. SIP PERAWAT	5	10	1	7	2	4	<b>29</b>
	4. SIPPTK	2	0	2	0	1	0	<b>5</b>
	5. SIP BIDAN	1	0	4	7	2	6	<b>20</b>
	6. SIO PUSKESMAS	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
	7. SIP FISOTERAPI	0	0	0	0	1	0	<b>1</b>
	8. SIP ATLM	0	0	0	1	1	0	<b>2</b>
	9. SIP REKAM MEDIK	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
	10. SIP ELEKTROMEDIS	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
	11. SIP RADIOGRAFER	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
	12. SIP PROMKES	1	0	0	0	0	0	<b>0</b>
	13. SIKGZ	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
	14. SURAT IZIN APOTIK	1	0	0	0	2	0	<b>3</b>
	15. SURAT IZIN KLINIK	0	0	0	0	0	2	<b>2</b>
	16. IO RUMAH SAKIT	0	0	0	0	0	0	<b>1</b>
	17. SLHS	0	1	0	0	0	0	<b>1</b>
	18. SPP-IRT	0	15	50	31	32	11	<b>139</b>
C	SEKTOR PERHUBUNGAN :							
	1. IZIN TAMBAT LABUH KAPAL	14	3	1	1	2	4	<b>25</b>
	2. IZIN BANGUNAN AIR DI PERAIRAN PEDALAMAN	0	2	0	0	0	0	<b>2</b>
	3. SURAT TANDA KECAKAPAN (STK)	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
	4. IZIN TRAYEK	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
D	SEKTOR SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
E	SEKTOR PENELITIAN	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>3. SEKSI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN III</b>								
A	SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG :							
	1. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)	5	2	0	6	7	10	<b>30</b>
	2. PKKPR	0	1	0	1	1	0	<b>3</b>
	3. SURAT IZIN PEMASANGAN REKLAME	19	21	23	32	30	16	<b>141</b>

B	SEKTOR PERMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	0	0	0	0	0	0
C	SEKTOR PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM :							
	1. NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	37	62	55	137	117	44	452
D	SEKTOR PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARAWISATA	0	0	0	0	0	0	0
E	SEKTOR TENAGA KERJA DAN TRANMIGRASI	0	0	0	0	0	0	0
F	SEKTOR PERTANIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	0	0	0	0	0	0
G	SEKTOR PENANAMAN MODAL	0	0	0	0	0	0	0

#### I. SUMBER DAYA MANUSIA

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang Profesional dan Kompeten di bidangnya sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang pegawai, dengan perincian sebagai berikut :

1. Eselon II.b : 1 (satu) Orang
2. Eselon III.a : 1 (satu) Orang
3. Eselon III.b : 4 (empat) Orang
4. Eselon IV.a : 2 (dua) Orang
5. JFT Analis Kebijakan : 1 (satu) Orang
6. JFT Penata Perizinan : 9 (sembilan) Orang
7. Staf PNS : 9 (sembilan) Orang
8. Staf Non PNS : 17(tujuh belas) Orang

#### J. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan Prasarana merupakan perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, antara lain:

1. **Kantor Depan (Front Office);**
  - a. Loker Penerimaan Berkas
  - b. Loker Penyerahan Berkas
  - c. Loker Layanan Informasi
  - d. Loker Layanan Konsultasi OSS
  - e. Tempat Layanan Pengaduan
  - f. Ruang Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan
  - g. Layanan Mini MPP
2. **Kantor Belakang (Back Office) ;**
  - a. Ruang Pemrosesan/Operator
  - b. Aula / Ruang Rapat
  - c. Ruang Bidang
3. **Ruang Pendukung/ Fasilitas Pendukung**
  - a. Ruang Tunggu
  - b. Ruang Server
  - c. Ruang Arsip
  - d. Ruang Laktasi /Menyusui
  - e. Toilet
  - f. Mushalla
  - g. Tempat Parkir

#### 4. Fasilitas Lainnya

- a. Seragam Pelayanan
- b. Formulir/Blanko
- c. Telepon dan Mesin Faksimile
- d. Perangkat Komputer, Printer dan Scanner
- e. Server
- f. Mesin Antrian Manual
- g. Pengukur Kepuasan Layanan (Aplikasi di Komputer)
- h. Kotak Pengaduan
- i. Kamera Pengawas (CCTV)
- j. Koneksi Internet (*wifi*)
- k. Website dan Email
- l. UPS (alat penyedia daya listrik)
- m. Alat pemadam kebakaran (APAR)
- n. Pendingin Ruangan (AC)
- o. Televisi
- p. Brosur
- q. Banner
- r. Petunjuk Arah Lokasi
- s. Kotak P3K
- t. Pantry Dapur

#### K. LAYANAN PENGADUAN

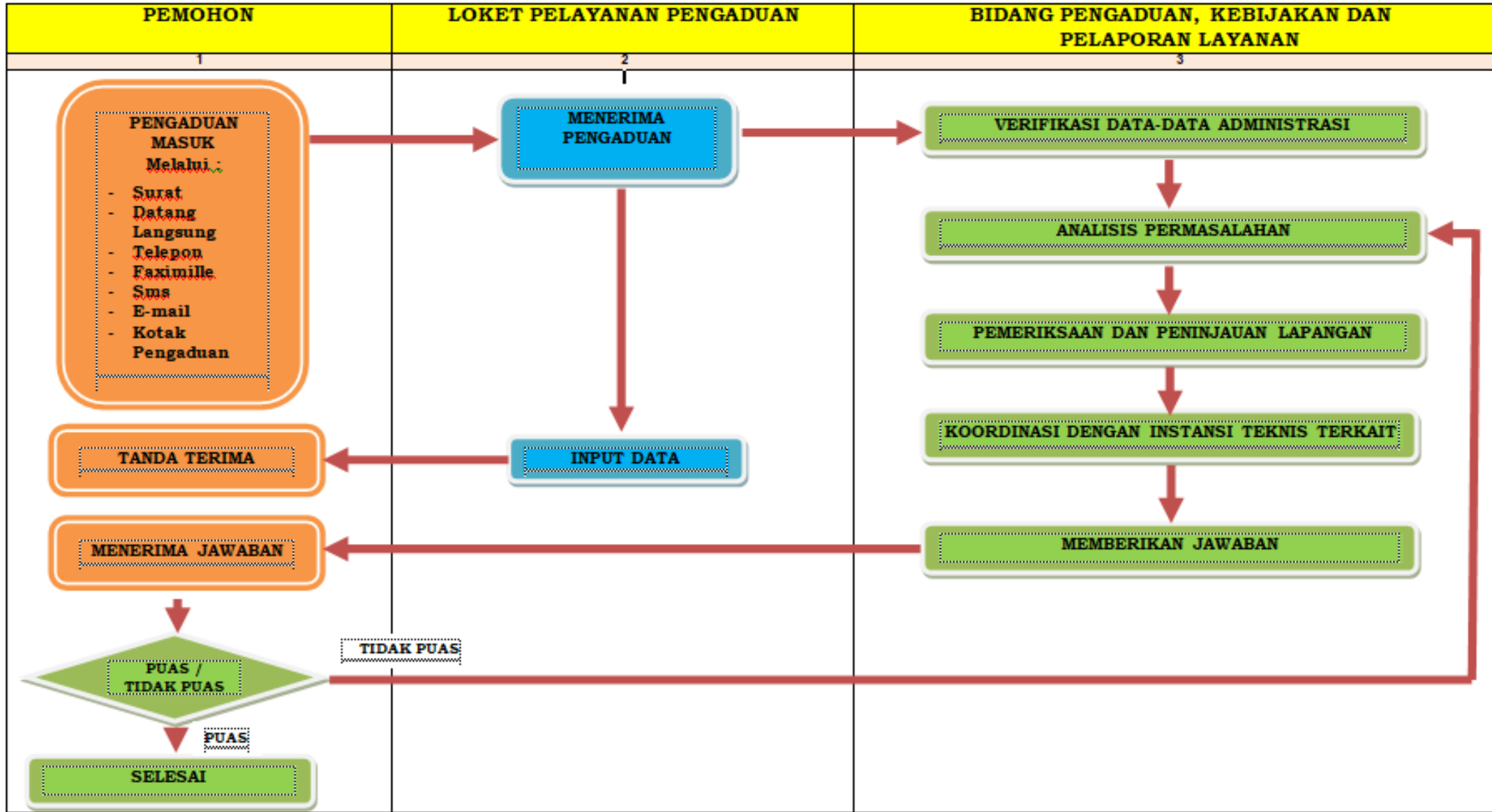
Untuk melayani pengaduan masyarakat terkait permasalahan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan, telah dibentuk loket layanan pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui :

1. Kotak Pengaduan  
Masyarakat dapat membuat surat tertulis berisi pengaduan layanan perizinan dan non perizinan dan dapat menyampaikannya melalui Kotak Pengaduan yang sudah disediakan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan.
2. Secara Langsung  
Masyarakat dapat langsung mengunjungi loket layanan pengaduan yang sudah tersedia di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan dan mengisi formulir pengaduan yang telah disediakan (formulir terlampir).
3. Melalui telepon/SMS ke Nomor : 082148183128

Alur Proses Penanganan Pengaduan Perizinan dan NonPerizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan, dengan mekanisme sebagai berikut :



Tabel 1. DIAGRAM ALIR/FLOW CHART PENANGANAN PENGADUAN



**Tabel 4.** Rekapitulasi Data Pengaduan pada Semester I (Januari - Desember ) Tahun 2023

No	Pelapor Pengaduan	No/Tanggal Surat Pengaduan	Terlapor	Jenis Pengaduan	Tindak Lanjut	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	WARSITO	503-570/01/III/DPMPTSP/2023	Lurah Bangkuang	Lurah Bangkuang tidak mau menandatangani sektsa/lokasi usaha budidaya/penangkapan ikan karena Izin Salambau Warsito tersebut telah habis masa berlaku pada tanggal 7 Maret 2023	Ditanggapi dan dilakukan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi	Sudah Proses
2	YENITA FEBRILIA	503-570/02/III/DPMPTSP/2023	-	Papan Reklame dengan nama "Playground Main Yuk" dirusak dan digantikan dengan papan reklame lain yang bukan milik pelapor	Ditanggapi dan dilakukan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi	Sudah Proses
3	WINARTO U.LUHAN	Selasa, 04 Juli 2023	PT.Palopo Indah Raya	Keberatan atas pembuatan Stokfile Batubara oleh Perusahaan PT.PALOPO INDAH RAYA serta masih ada bangunan rumah diatas tanah milik sdr. Winarto U.Luhan	Ditanggapi dan dilakukan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi	Penyelesaian selama 8 hari kalender
4	CAMAT DUSUN SELATAN	Selasa, 14 November 2023	-	Aktivitas Penambangan Pasir Pasang di Wilayah Desa Tanjung Jawa	Ditanggapi dan dilakukan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi	Penyelesaian selama 8 hari kalender
5	SALEH	Senin, 11 Desember 2023	Satpol-PP	Keberatan atas pencabutan papan reklame yang sudah ada izinnya yang berada di tiga titik dicabut oleh Satpol-PP bahwa pemasangan reklame tersebut tidak ada unsur politik	Ditanggapi dan dilakukan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi	Penyelesaian selama 8 hari kalender

## L. INOVASI

Inovasi dalam artian Inovasi Pelayanan Publik merupakan gagasan/ide kreatifitas dan/atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan mempunyai 4 (empat) jenis inovasi dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan antara lain :

### 1. MALEWU (MAJA KAN LEWU) ;

Slogan **MAJA KAN LEWU** atau disingkat "**MALEWU**" artinya berkunjung ke Desa. Ini adalah salah satu inovasi layanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan, dengan cara berkunjung ke Kecamatan/Desa serta Pembukaan Gerai Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Barito Selatan, yang tujuannya utamanya adalah memberikan kemudahan dalam rangka memberikan layanan perizinan dan non perizinan kepada pelaku usaha. Sehingga pelaku usaha tidak perlu datang ke Kantor tetapi anggota Tim Malewu yang datang ke tempat domisili pelaku usaha untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai kebutuhan pelaku usaha.

### 2. JOKI (POJOK KONSULTASI PERIZINAN) ;

Ini adalah salah satu inovasi layanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan, Dimana layanan Pojok Konsultasi Perizinan ini dilaksanakan setiap minggu saat kegiatan CarFreeDay Dimana para pelaku usaha UMKM berkumpul untuk menjual produk-produk unggulan mereka. Layanan yang diberikan antara lain :

1. Konsultasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan
2. Konsultasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
3. Layanan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB)

### 3. BALIHO dan BANNER ;

Penyediaan media Informasi Banner OSS Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik dan Layanan Perizinan lainnya yang dipasang pada setiap Kantor Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Barito Selatan yang bertujuan untuk memberikan informasi layanan perizinan dan non perizinan kepada pelaku usaha.

### 4. LAYANAN TRACKING PERIZINAN ONLINE ;

Pelayanan Tracking Perizinan Online bagi pelaku usaha yang melakukan pengurusan perizinan.

## M. SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, menjadi pedoman untuk mengukur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Dalam Survei Kepuasan Masyarakat telah dilakukan Survei Internal terhadap masyarakat yang respondennya di ambil secara acak dengan Blanko Quisioner terlampir. Dari survei kepuasan masyarakat dari bulan Januari - Desember 2023 terdapat **120 orang** responden ,yaitu:

- Laki-laki **59** orang
- Perempuan **61** orang

Maka diperoleh Nilai IKM dari Januari – Desember Tahun 2023 adalah **97,17** dengan kategori **Sangat Baik**.

**Tabel 6.** Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Semester I  
(Januari - Juni) Tahun 2023

**PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN  
DAN PER UNSUR PELAYANAN**

UNII PELAYANAN : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
ALAMAT : Jl. Pelita Raya NO.288 Buntok Kode Pos 73711 Buntok  
Tlp/Fax. : (0525) 21196 Faksimile (0525) 21196

Tempat Survei : DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PTSP  
Waktu Survei : Januari - Juni 2023  
Responden : 60 Orang

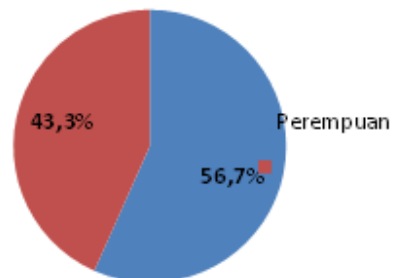
**IKM UNIT PELAYANAN : 95,97**

**Mutu Pelayanan : Sangat Baik**

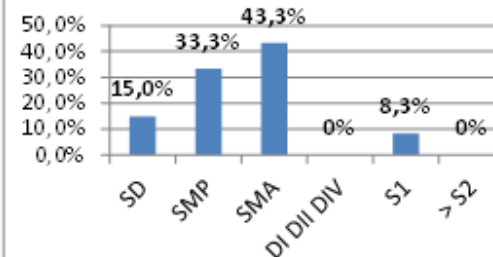
A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00  
B (Baik) : 76,61 - 88,30  
C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60  
D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	
U1	Persyaratan pelayanan	3,833	Sangat Baik
U2	Prosedur Pelayanan	3,833	Sangat Baik
U3	Waktu Pelayanan	3,833	Sangat Baik
U4	Biaya/Tarif Pelayanan	3,850	Sangat Baik
U5	Produk Pelayanan	3,850	Sangat Baik
U6	Kompetensi Petugas Pelayanan	3,833	Sangat Baik
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,850	Sangat Baik
U8	Sarana dan Prasarana	3,850	Sangat Baik
U9	Penanganan Pengaduan	3,850	Sangat Baik

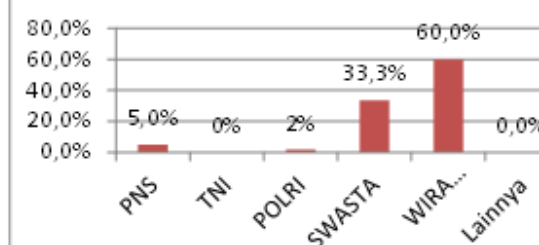
**Jenis Kelamin**



**Pendidikan Terakhir**



**Pekerjaan**



**Tabel 6.** Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Semester II  
(Juli - Desember ) Tahun 2023

**PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN  
DAN PER UNSUR PELAYANAN**

UNI PELAYANAN : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN BARITO SELATAN  
ALAMAT : Jl. Pelita Raya NO 288 Buntok Kode Pos 73711 Buntok  
Tlp/Fax. : (0525) 21196 Faksimile (0525) 21196

Tempat Survei : DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PTSP  
Waktu Survei : Juli - Desember 2023  
Responden : 60 Orang

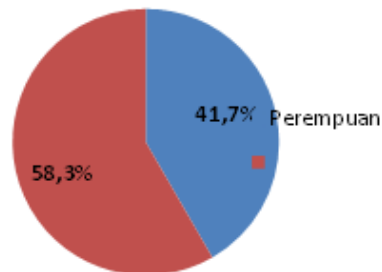
**IKM UNIT PELAYANAN : 98,37**

**Mutu Pelayanan : Sangat Baik**

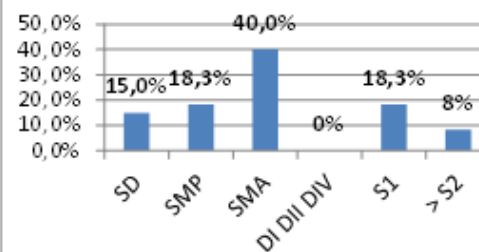
A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00  
B (Baik) : 76,61 - 88,30  
C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60  
D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	
U1	Persyaratan pelayanan	3,933	Sangat Baik
U2	Prosedur Pelayanan	3,933	Sangat Baik
U3	Waktu Pelayanan	3,933	Sangat Baik
U4	Biaya/Tarif Pelayanan	3,950	Sangat Baik
U5	Produk Pelayanan	3,933	Sangat Baik
U6	Kompetensi Petugas Pelayanan	3,950	Sangat Baik
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,933	Sangat Baik
U8	Sarana dan Prasarana	3,933	Sangat Baik
U9	Penanganan Pengaduan	3,950	Sangat Baik

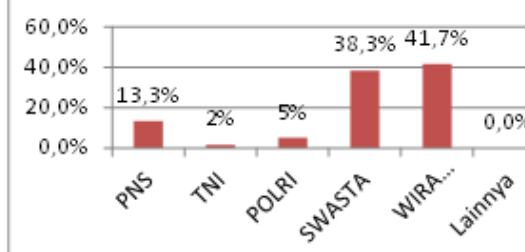
**Jenis Kelamin**



**Pendidikan Terakhir**



**Pekerjaan**



### BAB III

#### RENCANA INVESTASI

Target realisasi investasi tahun 2023 Kabupaten Barito Selatan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebesar **Rp. 523.100,080.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Seratus Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah)**

Total Realisasi Investasi PMA dan PMDN berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang direalisasikan oleh Pelaku Usaha di Kabupaten Barito Selatan jumlah investasi sebesar **Rp. 546.681.200.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Enam Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)** Realisasi investasi tersebut menyerap jumlah tenaga kerja sebanyak 318 orang.

Tabel 4.1  
Jumlah Realisasi Investasi PMA/PMDN Kabupaten Barito Selatan

Target Realisasi Investasi Th.2023 (Rp.Juta)	Persentase Capaian PMDN dan PMA Per Triwulan TH.2023			
	TW -1	TW 1+ TW 2	TW 1+TW 2+ TW 3	TW 1+TW 2+ TW 3 + TW-4
Kabupaten Barito Selatan	60.600.960.000,-	212.059.960.000,-	392.332.040.000,-	546.681.200.000,-
<b>523.100.080.000,-</b>	<b>11.58</b>	<b>40.54</b>	<b>75.00</b>	<b>104.51</b>

Tabel 4.2  
Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan

NO	Kabupaten/Kota	PMA		PMDN	
		TKI	TKA	TKI	TKA
1	Kabupaten Barito Selatan				
	TW-1	63	0	55	0
	TW-2	30	0	33	0
	TW-3	44	1	39	0
	TW-4	38	0	15	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>175</b>	<b>1</b>	<b>142</b>	<b>0</b>

Tabel 4.3  
Jumlah Proyek Kabupaten Barito Selatan

NO	Kabupaten/Kota	JUMLAH PROYEK	
		PMA	PMDN
1	Kabupaten Barito Selatan		
	TW-1	7	20
	TW-2	6	34
	TW-3	9	81
	TW-4	10	50
	<b>JUMLAH</b>	<b>32</b>	<b>185</b>

Tabel 4.4  
Jumlah Realisasi Investasi pertahun PMA/PMDN per tahun Kabupaten Barito Selatan

REALISASI PMDN DAN PMA DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2019 S/D 2023

NO	JENIS	2019	2020	2021	2022	2023				
						TW I	TW II	TW III	TW IV	JUMLAH
1	PMDN	12,131,600,000.00	12,445,800,000.00	1,361,410,600,000.00	191,605,500,000.00	9,397,400,000.00	112,749,600,000.00	57,415,800,000.00	122,290,900,000.00	301,853,700,000.00
2	PMA	966,264,492,000.00	91,284,003,000.00	12,505,687,000.00	277,369,690,000.00	51,203,560,000.00	38,709,400,000.00	122,856,280,000.00	32,058,260,000.00	244,827,500,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>978,396,092,000.00</b>	<b>103,729,803,000.00</b>	<b>1,373,916,287,000.00</b>	<b>468,975,190,000.00</b>	<b>60,600,960,000.00</b>	<b>151,459,000,000.00</b>	<b>180,272,080,000.00</b>	<b>154,349,160,000.00</b>	<b>546,681,200,000.00</b>

\* Sumber data : Kementerian Investasi / BKPM

TARGET REALISASI INVESTASI TH. 2023 (Rp. JUTA)	PERSENTASE CAPAIAN PMDN DAN PMA PER TRIWULAN TH. 2023			
	TW 1	TW 1 +TW 2	TW 1 +TW 2 + TW 3	TW 1+TW 2+TW 3+TW 4
UNTUK KABUPATEN BARITO SELATAN	60,600,960,000.00	212,059,960,000.00	392,332,040,000.00	546,681,200,000.00
523,100,080,000.00	11.58	40.54	75.00	104.51



## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Sejak OSS RBA diluncurkan dalam implementasinya masih banyak Pelaku Usaha maupun Pemerintah Daerah sebagai pengguna layanan yang kesulitan dalam mengaplikasikan sistem perizinan berusaha berbasis resiko tersebut. Hal ini disadari karena aplikasi OSS RBA sebenarnya masih dalam tahap pengembangan sehingga kendala tersebut pasti banyak terjadi. Namun kendala tersebut sebetulnya dalam masa transisi implementasinya oleh pengguna layanan OSS RBA.

Permasalahan dan kendala lainnya terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan, antara lain :

1. Masih kurangnya pemahaman dan penguasaan teknologi pelaku usaha terhadap layanan secara elektronik SICANTIK ,OSS RBA dan SIMBG
2. Validasi persetujuan komitmen perizinan dan non perizinan membutuhkan waktu yang lama dari Organisasi Perangkat Daerah terkait.
3. Pemohon tidak menindaklanjuti dengan cepat untuk kelengkapan kekurangan persyaratan (lengkap dan benar) termasuk rekomendasi dari dinas teknis terkait sehingga keterlambatan di dalam pemrosesan izin.


### B. SARAN

Berdasarkan uraian di atas, maka disarankan sebagai berikut:

1. Sosialisasi terhadap pelayanan secara elektronik (OSS-RBA, SICANTIK dan SIMBG) kepada masyarakat/pelaku usaha tidak hanya dikecamatan tetapi dilaksanakan juga di tingkat Desa.
2. Memberikan pemahaman dan persepsi yang sama bagi penyelenggara, masyarakat, dan pihak terkait terhadap standar pelayanan.
3. Penyelenggara pelayanan publik mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
4. Izin dipermudah dan Pengawasan diperketat artinya Evaluasi dan pengawasan internal secara berkala dan terus menerus harus dilakukan sehingga Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.
5. Unit pelayanan harus tetap mengacu pada standar pelayanan yang merupakan jaminan dan kepastian baik bagi penyelenggara dalam memberikan pelayanan maupun bagi masyarakat dalam menerima pelayanan.
6. Memberikan Sosialisasi kepada masyarakat/pelaku usaha terkait peraturan ataupun kebijakan baru.
7. Agar lebih ditingkatkan lagi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan.
8. Sumber Daya Manusia/ Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan harus selalu update mengikuti kegiatan Diklat dan Bimtek yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga guna peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur.

Buntok, 02 Januari 2024

Kepala Dinas,



**RIPALTHA, SE., MM**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690411 200003 1 009